

## BAB 6

### KESIMPULAN

Negara Federasi Rusia yang mewarisi kebesaran Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk tetap mempertahankan reputasinya sebagai negara yang disegani dunia seperti pada masa lalu. Sejak runtuhnya Uni Soviet dan berdirinya negara Federasi Rusia dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin, Rusia bukan lagi negara adi daya yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat. Kehancuran di segala bidang semakin lama semakin melemahkan Rusia. Sistem ekonomi pasar bebas yang menggantikan sistem ekonomi terpusat yang berlaku sejak 1921 menimbulkan stagnasi ekonomi yang berujung pada kebangkrutan dan kehancuran Uni Soviet. Bahkan sistem ekonomi kebarat-baratan yang diterapkan setelah runtuhnya Uni Soviet justru makin memperburuk perekonomian negara. Salah satu contoh dari kegagalan tersebut adalah program privatisasi yang menimbulkan banyak skandal, korupsi dan akhirnya menyeret Rusia berhutang lebih besar lagi pada IMF, Bank Dunia dan Kreditor Internasional.

Kondisi buruk tersebut terus berlangsung hingga tahun 1999. Keadaan baru berangsur membaik setelah Vladimir Putin menggantikan presiden Boris Yeltsin pada tahun 2000. Sejak menjabat sebagai presiden, Vladimir Putin mulai menggagas sentralisasi seperti pada zaman Uni Soviet. Semua kekuasaan politik dan geografis negara dikembalikan menjadi terpusat di Kremlin. Desentralisasi dengan semangat *glasnost&perestroika* yang dirintis sejak masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev dan berlanjut pada masa kepemimpinan presiden Boris Yeltsin sedikit demi sedikit disingkirkan oleh Vladimir Putin.

Sentralisasi yang dijalankan presiden Vladimir Putin tidak untuk melanggengkan atau mengokohkan kekuasaannya seperti yang sering dituduhkan pihak Barat tetapi bertujuan untuk mengakhiri demokrasi tidak terkendali dan membatasi ruang gerak para ekstrimis. Presiden Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap demokrasi di Rusia. Namun ia mengingatkan bahwa demokrasi tersebut

harus disesuaikan dengan kondisi negara dan masyarakat Rusia yaitu kenyataan bahwa Rusia adalah Negara Paternalistik. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Geertz Hofstede, seorang ahli sosial asal Belanda. Dari penelitiannya, disimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks “power distance” (jarak kekuasaan yang relatif tinggi). Rakyat di Negara dengan indeks “power distance” yang tinggi, relatif bisa menerima otoritas yang kurang demokratis. Pernyataan tersebut benar adanya karena pada kenyataannya rakyat Rusia lebih memilih kestabilan dibawah kepemimpinan presiden Vladimir Putin yang mirip seperti pada zaman Uni Soviet yaitu dengan sistem sentralisme demokratik daripada ketidakstabilan dan kebebasan dibawah kepemimpinan presiden Boris Yeltsin yang demokratis liberal seperti di negara-negara Barat.

Rakyat Rusia bukan tidak menyadari bahwa pemerintahan presiden Vladimir Putin tak ubahnya pemerintahan masa Uni Soviet yang sentalistik. Sejak menjabat sebagai presiden Rusia, Vladimir Putin telah secara bertahap mengurangi banyak bagian demokrasi dengan melemahkan peran Duma dan Lembaga Pemerintahan, menghapus pemilu regional dan kursi parlemen kelompok independent, membatasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers. Serangkaian pembunuhan dan penangkapan terhadap wartawan dan lawan-lawan politiknya juga dikaitkan dengannya. Namun keberhasilan keluar dari krisis ekonomi membuat rakyat Rusia tidak banyak mengajukan keberatan terhadap kebijakan pemerintahannya.

Alasan lainnya adalah beberapa dari kebijakannya justru memperlihatkan adanya demokrasi seperti keberhasilannya mendorong ekonomi pasar di Rusia, melakukan reformasi di bidang hukum dengan merevisi sistem hukum kolektivitas masa Uni Soviet yang cenderung birokratisme serta mengatur ulang peran hakim dan pengadilan Rusia yang terkenal korup untuk mengurangi peluang penyuapan dan manipulasi yang merugikan rakyat. Ia juga melakukan reformasi politik dengan mendukung perkembangan partai politik agar Rusia menjadi negara yang multi partai. Berbagai UU yang disahkan pada tahun 2001 bertujuan untuk menghapus banyak persyaratan tidak berguna bagi perusahaan yang ingin mendapat lisensi dan sertifikasi produk dengan lebih mudah dan transparan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan presiden Vladimir Putin yang membuatnya berhasil mengatasi krisis ekonomi di Rusia adalah sistem sentralisme demokratik. Kebijakan-kebijakannya yang berpegang pada prinsip sentralisme demokaratik yaitu “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi” terbukti mampu menciptakan keseimbangan antara sentralisme dan demokrasi dalam pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya demokrasi di negara tersebut tidak menjadi kebablasan seperti pada masa Boris Yeltsin. Demikian pula dengan sentralisme yang tidak mengarah pada birokratisme seperti saat Stalin berkuasa. Hal ini harus diperhatikan karena sentralisme dan demokrasi merupakan dua hal yang sama pentingnya bagi Rusia. Adanya demokrasi memungkinkan rakyat untuk memantau jalannya pemrintahan dan adanya sentralisme memungkinkan pemerintah untuk memantau kehidupan rakyatnya. Dengan demikian suatu pemerintahan yang kuat, efektif dan juga fleksibel dapat tercipta di Rusia.

